



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2024 ini merupakan acuan perencanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari Rencana Strategis (Renstra) 2019-2023. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana kerja dimaksud untuk masa mendatang

Tanjungpinang, 2023

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang**

KOTA TANJUNGPINANG



Dr. SUSLI, M.Eng
NIP. 19730615 200312 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
 BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	 8
2.1. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah	8
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	31
2.3. Isu isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	33
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah	38
 BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 50
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	50
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	52
 BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 53
 BAB V. PENUTUP	 68
DAFTAR ISI	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Belanja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Tahun 2022
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang
Tabel 2.3.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Tanjungpinang
Tabel 3.1.	Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
Tabel 4.1.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas PUPR Kota Tanjungpinang

BAB I

PEN D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.

Selanjutnya Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan satuan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kota Tanjungpinang dibidang pembangunan dan penataan kota yang memasuki tahun ke dua pemerintahan baru.



Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang merupakan tahapan awal yang dilakukan sebelum dituangkan menjadi Dokumen pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang. Penyusunan rencana kinerja ini dimulai dengan merumuskan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang yang merupakan rencana jangka menengah (tiga tahun), yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana tiga tahunan tersebut kedalam rencana kerja tahunan. Berdasarkan rencana kerja tahunan tersebut akan ditindak lanjuti dengan penyusunan RKA dan DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang.

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis RPD dan Renstra OPD ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian, Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dikelola OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang.

Proses penyusunan Renja ini dimulai dengan persiapan penyusunan RENJA OPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan pada penjarangan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan.

Prinsip-prinsip dalam penyusunan rancangan Renja OPD adalah sebagai berikut :



- a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD.
- b. Rumusan pprogram/kegiatan didalam Renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD.
- c. Penyusunan Renja OPD bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
- d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan pengeluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada diatasnya seperti RPD, Renstra OPD dan RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) , kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar Pelayanan minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Derah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Derah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Derah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);



15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 14);
21. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11).
22. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 21).

Disamping Dasar Hukum yang menyertai penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang juga tetap berpijak pada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026, yang dilandasi dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang dan fokus pada pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai setiap tahunnya, yang diwujudkan dalam dokumen perencanaan, yang disusun secara



sistematis dalam rencana kerja SKPD tahun 2024.

Dengan Dasar Hukum ini, menjadi Dasar semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja program dan kegiatan setiap tahun dengan parameter yang terukur dan dapat dilaksanakan untuk menjawab berbagai permasalahan sesuai dengan kemampuan anggaran yang diselaraskan dengan Rencana Strategis yang telah disusun sebelumnya.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang adalah untuk menyajikan dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang.
2. Program-program dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang meliputi : tahapan perumusan rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang dan tahap penyajian rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang. Dalam tahapan ini dilakukan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang, telaahan terhadap rancangan awal RKPD, perumusan tujuan dan sasaran sampai kepada dokumen Rencana Kerja.

Secara garis besar isi dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang sebagai berikut :



Bab I. PENDAHULUAN;

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang yang berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

Bab II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TANJUNGPINANG TAHUN LALU;

Bab ini memuat kajian (review) Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menggambarkan hasil realisasi dan usulan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, yang berisikan Hasil Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra , Analisis kinerja pelayananan, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang, Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Bab III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menjelaskan Telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang serta program dan Kegiatan

Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Program serta Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2024

Bab V. PENUTUP.

Bab ini berisikan uraian penutup, menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2022 DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TANJUNGPINANG

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Tahun 2022

Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Dinas Pekerjaan dan Umum Penataan Ruang Kota Tanjungpinang. Namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil analisa untuk kemudian disusun isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Rencana penganggaran pada tahun 2022 direncanakan untuk biaya program dan kegiatan prioritas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tanjungpinang sebesar Rp. 85.997.175.315,- anggaran tersebut dibagi ke dalam 2 (dua) belanja, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel 2.1
Rekapitulasi Belanja Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1.	Belanja Tidak Langsung		
	a. Belanja Pegawai	Rp 8.934.961.912,-	Rp 8.390.211.008,-
2.	Belanja Langsung		
	a. Belanja Barang dan Jasa	Rp 12.765.684.425,-	Rp 11.941.228.678,-
	b. Belanja Modal	Rp 51.433.811.372,-	Rp 45.899.561.341,-

Sedangkan untuk alokasi anggaran urusan wajib dan pilihan sebesar Rp. 85.997.175.315,- direncanakan untuk membiayai 10 program, 19 kegiatan dan 45 Sub Kegiatan. Pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2022 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang dapat berjalan dengan baik. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rencana kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian dan Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyediaan jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan bangunan Lainnya.

2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
 - Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
 - Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di kawasan Perkantoran.



3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbahh Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
 - Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman.

4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan.

5. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

- Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Pemukiman di kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman di kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Pemukiman di kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

6. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

- Kegiatan Penyelenggaran Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Lain fungsi bangunan Gedung.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
 - Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi, Renovasi, dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.



7. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

- **Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**
 - Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan.

8. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA

- Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Perencanaan Jalan dan Jembatan
 - Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan
 - Sub Kegiatan Pembangunan Jalan
 - Sub Kegiatan pelebaran Jalan Menuju Standar
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala jalan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin jalan
 - Sub Kegiatan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

9. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI

- Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 - Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
- Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
- Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
 - Sub Kegiatan Penyusunan SOP/ Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
 - Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan jasa Konstruksi

10. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

- Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota



- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
- Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang.

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 77.062.213.403,- memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 70.242.522.580,- Persentasi 91.15 %, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2022			Ket
				Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	108.196.100,-	103.315.590,-	95.49	100	
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	31.760.000,-	24.000.000,-	75.57	75.57	
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.999.500,-	14.993.365,-	99.96	100	
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.488.510,-	56.548.406,-	98.36	100	
		- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.253.550,-	29.625.670,-	94.79	100	

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2022			Ket
				Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
		- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	178.609.800,-	175.249.500,-	98.12	100	
		- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.059.975,-	49.660.745,-	99.20	100	
		- Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	271.164.000,-	190.336.874,-	70.19	70.19	
4.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.934.961.912,-	8.390.211.008,-	93.90	100	
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Penyediaan jasa Surat Menyurat	5.400.000,-	3.000.000,-	55.56	55.56	
		- Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	278.560.000,-	203.361.916,-	73.00	73.00	
		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan kantor	2.796.666.460,-	2.620.783.876,-	93.71	100	
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	202.850.000,-	181.920.730,-	79.71	79.71	
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	77.500.000,-	77.467.000,-	99.96	100	
		- Pemeliharaan	131.500.000,-	129.417.900,-	98.46	100	



No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2022			Ket
				Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
		Peralatan dan mesin Lainnya					
		- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	9.464.317.116,-	8.963.685.914,-	94.71	100	

2) Program Pengelolaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program Pengelolaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.150.336.551,- memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 3.538.997.413,- Persentasi 85.27% dan realisasi Fisik sebesar 90.79%, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

No	Kegiatan	Sub kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2022			Ket
				Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	248.685.717,-	247.550.839,-	99.55	100	
		- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1.506.953.025,-	1.245.851.250,-	82.67	82.67	
		- Operasi dan Pemeliharaan SPAM di kawasan Perkantoran	2.394.724.809,-	2.045.595.324,-	85.42	89.70	

3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.400.382.880,- memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 2.274.994.364,- Persentasi 94.78% dan realisasi Fisik sebesar 97.89 %, dengan perincian sebagai imana



tercantum pada tabel berikut ini:

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2022			Ket
				Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Pemukiman	20.000.000,-	19.909.429,-	99.95	100	
		- Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Pemukiman	2.380.382.880,-	2.255.084.935,-	94.74	97.89	

4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program Pengelolaan dan Pembangunan Sistem Drainase dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.854.893.603,- memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 3.682.379.217,- Persentasi 94.78 %, dan Realisasi Fisik sebesar 96.54 % dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2022			Ket
				Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung Dengan Suang dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.668.224.710,-	1.581.224.231,-	94.78	95.03	
		- Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	2.186.668.893,-	2.101.154.986,-	96.09	98.06	

5) Program Pengembangan Permukiman

Program Pengembangan Permukiman dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.252.472.227,- memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 19.718.669.344 Persentasi 89.75 % dan realisasi Fisik sebesar 98.25 %, dengan perincian sebagaimana tercantum



pada tabel berikut ini :

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2022			Ket
				Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
1.	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Pemukiman di kawasan Strategis Daerah Kabupaten /Kota	- Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman di kawasan Strategis Daerah Kabupaten /Kota	19.566.307.101	19.055.054.901	97.39	99.21	
		- Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Pemukiman di kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	686.165.126,-	663.614.443,-	96.71	97.29	

6) Program Penataan Bangunan Gedung

Program Penataan Bangunan Gedung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.413.454.812,- memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 14.193.562.492,- Persentasi 97.18 % dan realisasi Fisik sebesar 99.17 %, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2022			Ket
				Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
1.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten / Kota. Pemberian	- Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli	214.249.600,-	212.762.174,-	99.31	100	



No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2022			Ket
				Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Lain fungsi bangunan Gedung	Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	12.311.609.784,-	12.149.268.893,-	98.68	100	
		- Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota	1.887.595.428,-	1.831.531.425,-	97.03	97.50	
		- Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					

7) Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

Program Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.823.613.807,- memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 147.645.066,- Persentasi 3.86 %, dan Realisasi Fisik sebesar 56.80 %, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2022			Ket
				Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
1.	Penyelenggara n Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	- Penataan Bangunan dan Lingkungan	3.823.613.807,-	147.645.066,-	3.86	56.80	



8) Program Penyelenggaraan Jalan

Program Penyelenggaraan Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.938.313.452,- memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 12.357.066.897,- Persentasi 98.51 % dan realisasi Fisik sebesar 100 %, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2022			Ket
				Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
1.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota	- Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Perencanaan Jalan dan Jembatan	1.574.171.297,-	1.552.269.847,-	98.61	100	
		- Survey Kondisi Jalan dan/ Jembatan	330.000.000,-	324.897.000,-	98.45	98.45	
		- Pembangunan jalan	1.598.350.955,-	1.458.414.591,-	91.24	100	
		- Rehabilitasi Jalan Menuju Standar	5.463.456.000,-	5.123.686.001,-	93.78	98.06	
		- Pemeliharaan Berkala Jalan	243.000.000,-	232.580.570,-	95.71	100	
		- Pemeliharaan Rutin Jalan	3.259.335.200,-	3.214.386.502,-	98.62	99.17	
		- Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan	470.000.000,-	450.829.386,-	95.92	100	

9) Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 657.047.500,- memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 642.762.839,- Persentasi 97.60 % dan realisasi Fisik sebesar 99.13 %, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2022			Ket
				Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
1.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	- Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	221.484.700,-	220.385.610,-	99.49	100	
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	- Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	286.039.700,-	286.039.700,-	96.69	99.48	
	Pengawasan Tertib Usaha Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	- Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	119.344.100,-	115.677.759,-	96.93	98.75	
		- Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	30.179.000,-	30.161.000,-	99.94	100	

10) Program Penataan Ruang

Program Penataan Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp 335.547.600,- memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 330.303.222,- Persentasi 98.44 % dan realisasi Fisik sebesar 100 %, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2022			Ket
				Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	128.655.000,-	126.738.696,-	98.51	100	
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	206.892.600,-	203.564.526,-	98.39	100	

Selama tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang telah melaksanakan 10 program, 18 kegiatan dan 43 Sub Kegiatan, Indikator kinerja program urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Tanjungpinang ditunjukkan sebanyak 14 indikator kinerja yang tersebar di 13 program pembangunan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 indikator dengan status capaian kategori sangat tinggi, sebanyak 2 indikator dengan status capaian kategori tinggi, sebanyak 2 indikator dengan status capaian kategori rendah.

Secara rinci perkembangan kinerja urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terlihat pada tabel berikut ini:



Tabel 2.2
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2022

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022		% Capaian Target RKPD 2022	Status
				Realisasi	Target	Realisasi		
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	48.40	32.25	48.40	150.09	ST
2.	Program Penyelenggaraan Jalan	Panjang Jalan terbangun	km	4.3	4.5	2.19	48.67	SR
3.		Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap	km	373.74	259	372.13	143.68	ST
4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jaringan air minum yang terpasang	%	65.45	65.27	65.90	100.97	ST
5.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat SPALD-T terbangun	unit	3	3	4	133,33	ST
6.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Jumlah titik genangan	titik	24	23	23	100	ST
7.	Program Pengembangan Permukiman	Jumlah gedung pemerintahan yang terbangun	unit	2	3	5	166,67	ST
8	Program Jasa Konstruksi	Ketersediaan Dokumen Hasil Pendataan Harga Barang dan Upah	%	100	100	100	100	ST
9.	Program Jasa Konstruksi	Persentase pemohon uji konstruksi	%	100	100	100	100	ST



		yang dilayani						
10.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase RTBL yang ditetapkan dengan Perwako	%	33.33	40	33.33	83.33	T
11.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Persentase ruang yang dimanfaatkan sesuai peruntukan	%	21.30	24.00	22.00	91.67	ST
		2. Persentase RTH publik	%	15.22	18.05	15.22	84.32	T
12.	Program Pengembangan Permukiman	Luasan Kawasan Kumuh	Ha	23.53	9.74	28.73	-94.97	SR

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022																									
OPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																									
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD dan APBD Tahun 2022				Target Kinerja dan Anggaran RKPD dan APBD Tahun 2022 yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)				
				Satuan Indikator	RKPD		APBD		Satuan Indikator	RKPD Perubahan		APBD Perubahan		I		II		III				IV			
1	2	3	4	5	6		7		8	9		10		11		12		13		14		15 = 11 + 12 + 13 + 14		16 = 15 / 10 * 100	
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				352.719.144.950		76.261.447.668			79.313.228.528		85.997.175.315		1.480.979.050		11.031.118.475		16.528.657.935		48.805.180.134		77.845.935.594	100,00	90,52
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				352.719.144.950		76.261.447.668			79.313.228.528		85.997.175.315		1.480.979.050		11.031.118.475		16.528.657.935		48.805.180.134		77.845.935.594	100,00	90,52
1 03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				352.719.144.950		76.261.447.668			79.313.228.528		85.997.175.315		1.480.979.050		11.031.118.475		16.528.657.935		48.805.180.134		77.845.935.594	100,00	90,52
1 03 01		PROGRAM PENUNDAK URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				24.629.471.660		18.179.128.741			20.330.909.601		23.171.112.883		1.480.979.050		5.402.780.178		4.641.378.060		10.259.440.712		21.784.578.000	100,00	94,02
103012,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				124.771.395		88.539.150			88.539.150		108.196.100				28.628.400		23.527.450		51.159.740		103.315.590		
103012,0101		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Kegiatan Perangkat Daerah	Dokumen	1	124.771.395	1	88.539.150	Dokumen	1	88.539.150	1	108.196.100		0		28.628.400		23.527.450	1	51.159.740	1	103.315.590	100,00	95,49
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																							100,00	95,49	
Predikat Kinerja Kegiatan																							ST	ST	
103012,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.534.492.825		7.629.997.661			8.803.640.462		8.934.961.912		1.057.058.986		3.047.891.334		1.897.457.792		2.387.802.895		8.390.211.007		
103012,0201		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS	%	100	7.534.492.825	12	7.629.997.661	%	100	8.803.640.462	100	8.934.961.912	25	1.057.058.986	25	3.047.891.334	25	1.897.457.792	25	2.387.802.895	100	8.390.211.007	100,00	93,90
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																							100,00	93,90	
Predikat Kinerja Kegiatan																							ST	ST	
103012,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				49.930.000					31.760.000										20.000.000		20.000.000		
103012,0509		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	%	100	49.930.000	100	0	%	100	0	100	31.760.000							100	20.000.000	100	20.000.000	100,00	62,97
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																							100,00	62,97	
Predikat Kinerja Kegiatan																							ST	R	
103012,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.213.900.000		468.827.415			468.827.415		603.575.335				193.826.113		129.987.732		193.933.477		517.747.322		
103012,0601		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhiya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	%	100	30.000.000	100	14.999.500	%	100	14.999.500	100	14.999.500	25	0	25	9.358.826	25	5.634.539	25		100	14.993.365	100,00	99,96
103012,0602		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhiya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	530.700.000	100	49.999.510	%	100	49.999.510	100	57.488.510	25	0	25	33.136.208	25	16.757.681	25	6.051.429	100	55.945.318	100,00	97,32
103012,0603		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhiya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	%	100	40.000.000	100	31.253.550	%	100	31.253.550	100	31.253.550	25	0	25	13.949.632	25	9.412.974	25	6.263.064	100	29.625.670	100,00	94,79
103012,0604		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhiya kebutuhan Logistik Kantor	%	100	430.000.000	100	116.987.880	%	100	116.987.880	100	178.609.800	25	0	25	84.615.000	25	29.160.000	25	64.474.500	100	178.249.500	100,00	99,80
103012,0605		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhiya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	%	100	320.200.000	100	50.059.975	%	100	50.059.975	100	50.059.975	25	0	25	13.748.026	25	16.087.841	25	19.824.878	100	49.660.745	100,00	99,20
103012,0606		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhiya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	%	100	82.500.000	100	10.000.000	%	100	10.000.000	100		0	0	0	0		0	0	0	0	-	-	
103012,0609		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhiya kebutuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	%	100	780.500.000	100	195.527.000	%	100	195.527.000	100	271.164.000	25	0	25	39.018.421	25	52.934.697	25	97.319.606	100	189.272.724	100,00	69,80
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																							100,00	85,78	
Predikat Kinerja Kegiatan																							ST	T	



103012,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				150.000.000		314.401.600			314.401.600		314.401.600			311.718.000					311.718.000		
103012,0706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket	1	150.000.000	1	314.401.600	Paket	1	314.401.600	1	314.401.600		1	311.718.000				1	311.718.000	100,00	99,15
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																				100,00	99,15	
Predikat Kinerja Kegiatan																				ST	ST	
103012,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.549.977.440		3.125.560.960			3.125.560.960		3.080.626.460		423.920.060	998.883.827		572.129.819		882.087.437	2.877.021.147		
103012,0801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terbayarnya Jasa Surat Menyurat	%	100	4.300.000	100	5.400.000	%	100	5.400.000	100	5.400.000	25	25	2.000.000	25	1.000.000	25	100	3.000.000	100,00	55,56
103012,0802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tahun	1	289.640.000	1	286.560.000	Tahun	1	286.560.000	1	278.560.000	0	0	93.596.731	0	32.453.659	1	74.341.600	200.391.986	100,00	71,94
103012,0804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	3.256.037.440	12	2.833.600.960	Bulan	12	2.833.600.960	12	2.796.666.460	2	423.920.060	903.287.096	3	538.676.160	4	807.745.837	2.673.629.161	100,00	95,60
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																				100,00	93,39	
Predikat Kinerja Kegiatan																				ST	ST	
103012,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				11.006.400.000		6.551.801.959			7.529.940.010		10.097.591.476			821.832.504		2.018.275.267		6.724.457.163	9.564.564.934		
103012,0901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan operasional terpelihara dan terbayar pajaknya	Tahun	1	295.000.000	1	199.850.000	Tahun	1	199.850.000	1	202.850.000	0	0	31.637.950	0	47.675.080	1	88.673.700	167.986.730	100,00	82,81
103012,0903	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Terbayarnya Jasa Service Kendaraan alat berat	Tahun	1	280.000.000	1	82.000.000	Tahun	1	82.000.000	1	77.500.000	0	0	10.704.600	0	36.415.000	1	30.347.400	77.467.000	100,00	99,96
103012,0906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Tahun	1	210.000.000	1	150.000.000	Tahun	1	150.000.000	1	131.500.000	0	0	39.473.100	0	5.328.000	1	80.656.800	125.457.900	100,00	95,41
103012,0909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	Kegiatan	1	5.979.400.000	1	5.919.951.959	Kegiatan	1	6.898.090.010	1	9.464.317.116	0	0	740.016.854	0	1.928.857.187	1	6.303.829.023	8.972.703.064	100,00	94,81
103012,0911	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kegiatan	1	4.242.000.000	1	200.000.000	Kegiatan	1	200.000.000	1	221.424.360	0	0	0	0	1	220.950.240	220.950.240	100,00	99,79	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																				100,00	94,72	
Predikat Kinerja Kegiatan																				ST	ST	
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				43.758.700.000		3.279.353.507			3.279.353.507		4.150.336.551		-	444.909.999		1.086.808.261		1.161.988.654	2.693.706.914	100,00	64,90
103032,01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				43.758.700.000		3.279.353.507			3.279.353.507		4.150.336.551			444.909.999		1.086.808.261		1.161.988.654	2.693.706.914		
103032,0103	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Terbangunnya SPAM dan Jaringan Perpipaan	Kegiatan	1	27.635.000.000	1	248.658.717	Kegiatan	1	248.658.717	1	248.658.717	0	0	0	0	29.427.750	1	218.123.089	247.550.839	100,00	99,55
103032,0107	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Penambahan Jumlah Sambungan Rumah Tangga yang mengakses jaringan SPAM	Kegiatan	1	13.530.200.000	1	1.506.953.025	Kegiatan	1	1.506.953.025	1	1.506.953.025	0	0	4.159.300	0	521.646.413	1	720.045.537	1.245.851.250	100,00	82,67
103032,01015	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Meningkatnya pengelolaan air minum	%	100	2.593.500.000	100	1.523.741.765	%	100	1.523.741.765	100	2.394.724.809	0	25	440.750.699	50	535.734.098	25	223.820.028	1.200.304.825	100,00	50,12
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																				100,00	64,90	
Predikat Kinerja Kegiatan																				ST	R	
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				1.472.500.000		2.380.382.880			2.380.382.880		2.400.382.880		-	21.025.100		616.000.000		1.637.669.264	2.274.694.364	100,00	94,76
103052,01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.472.500.000		2.380.382.880			2.380.382.880		2.400.382.880			21.025.100		616.000.000		1.637.669.264	2.274.694.364		
103052,0105	Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Limbah dalam Kondisi Mantap	%	100	262.500.000			%			100	20.000.000					100	19.909.429	100	19.909.429	100,00	99,55
103052,0112	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	SR	50	1.210.000.000	200	2.380.382.880	SR	50	2.380.382.880	50	2.380.382.880	0	0	21.025.100	0	616.000.000	50	1.617.759.835	2.254.784.935	100,00	94,72
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																				100,00	94,76	
Predikat Kinerja Kegiatan																				ST	ST	



1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				13.946.190.000		3.824.893.603			3.824.893.603		3.854.893.603		-		165.751.505		906.313.048		2.608.906.745		3.680.971.298	100,00	95,49
103062,01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				13.946.190.000		3.824.893.603			3.824.893.603		3.854.893.603		-		165.751.505		906.313.048		2.608.906.745		3.680.971.298		
103062,0105	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Meningkatnya Sistem Jaringan Drainase Skala Kota	Kegiatan	1	13.741.145.000	0,3	1.853.224.709	Kegiatan	1	1.853.224.709	1	1.668.224.710	0	0	0	13.272.108	0	479.694.431	1	1.086.849.772	1	1.579.816.311	100,00	94,70
103062,0107	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Berkurangnya kawasan genangan air	Kegiatan	1	205.045.000	1,0	1.971.668.894	Kegiatan	1	1.971.668.894	1	2.186.668.893	0	0	0	152.479.397	0	426.618.617	1	1.522.056.973	1	2.101.154.987	100,00	96,09
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																						100,00	95,49	
Predikat Kinerja Kegiatan																						ST	ST	
1 03 07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				109.148.278.012		19.142.972.429			19.292.972.429		20.252.472.227		-		825.047.952		4.019.459.378		14.874.962.014		19.719.469.344	100,00	97,37
103072,01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				109.148.278.012		19.142.972.429			19.292.972.429		20.252.472.227		-		825.047.952		4.019.459.378		14.874.962.014		19.719.469.344		
103072,0101	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Paving Blok/Semenisasi yang Terbangun	%	100	95.899.978.012	100	18.532.967.703	%	100	18.682.967.703	100	19.566.307.101	0	0	10	728.751.663	40	3.921.231.288	50	14.405.871.950	100	19.055.854.901	100,00	97,39
103072,0102	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	%	100	13.248.300.000	100	610.004.726	%	100	610.004.726	100	686.165.126	0	0	10	96.296.289	40	98.228.090	50	469.090.064	100	663.614.443	100,00	96,71
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																						100,00	97,37	
Predikat Kinerja Kegiatan																						ST	ST	
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				17.731.300.000		14.114.281.149			14.864.281.149		14.413.454.812		-		878.907.605		1.941.689.739		11.371.140.306		14.191.737.650	100,00	98,46
103082,01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				17.731.300.000		14.114.281.149			14.864.281.149		14.413.454.812		-		878.907.605		1.941.689.739		11.371.140.306		14.191.737.650		
103082,0101	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Meningkatnya Persentase Bangunan yang ber IMB	Kegiatan	1	485.000.000	1	221.299.600	Kegiatan	1	221.299.600	1	214.249.600	0	0	0	50.698.505	0	92.828.233	1	69.235.436	1	212.762.174	100,00	99,31
103082,0102	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang terbangun	Kegiatan	1	13.036.300.000	1	12.211.609.784	Kegiatan	1	12.211.609.784	1	12.311.609.784	0	0	0	817.878.900	0	1.712.845.056	1	9.618.544.937	1	12.149.268.893	100,00	98,68
103082,0112	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan rehabilitasi, renovasi dan ubahsui	Kegiatan	1	4.210.000.000	1	1.681.371.765	Kegiatan	1	2.431.371.765	1	1.887.595.428	0	0	0	10.330.200	0	136.016.450	1	1.683.359.933	1	1.829.706.583	100,00	96,93
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																						100,00	98,46	
Predikat Kinerja Kegiatan																						ST	ST	
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				8.150.000.000		4.257.249.807			4.257.249.807		3.823.613.807		-		8.410.900		9.266.500		129.967.666		147.645.066	100,00	3,86
103092,01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				8.150.000.000		4.257.249.807			4.257.249.807		3.823.613.807		-		8.410.900		9.266.500		129.967.666		147.645.066		
103092,0103	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Mewujudkan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan pusaka	Kegiatan	1	8.150.000.000	1	4.257.249.807	Kegiatan	1	4.257.249.807	1	3.823.613.807	0	0	0	8.410.900	0	9.266.500	1	129.967.666	1	147.645.066	100,00	3,86
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																						100,00	3,86	
Predikat Kinerja Kegiatan																						ST	SR	



1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				132.658.248.600		10.283.760.352			10.283.760.352		12.938.313.452			-		2.907.008.647		3.220.950.271		6.245.357.979		12.373.316.897	100,00	95,63
103102,01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				132.658.248.600		10.283.760.352			10.283.760.352		12.938.313.452					2.907.008.647		3.220.950.271		6.245.357.979		12.373.316.897		
103102,0101	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Meningkatkan Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan Jalan Kota	Kegiatan	1	447.650.000	1	1.014.171.297	Kegiatan	1	1.014.171.297	1	1.574.171.297	0	0	0	0	950.931.060	0	19.477.851	1	581.860.930	1	1.552.269.847	100,00	98,61
103102,0104	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedia data jalan dan jembatan	Dokumen	1	400.000.000	1	330.000.000	Dokumen	1	330.000.000	1	330.000.000	0	0	0	0		0	29.859.000	1	295.038.000	1	324.897.000	100,00	98,45
103102,0105	Pembangunan Jalan	Meningkatkan Jumlah Panjang Jalan	Kegiatan	1	97.398.300.000	1	1.379.610.955	Kegiatan	1	1.379.610.955	1	1.598.350.955	0	0	0	0	342.325.051	0	901.542.859	1	215.346.680	1	1.459.214.591	100,00	91,30
103102,0106	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Meningkatkan Kelancaran Lalu Lintas dan Kapasitas Struktur Jalan	Kegiatan	1	17.287.400.000	1	5.463.466.000	Kegiatan	1	5.463.466.000	1	5.463.456.000	0	0	0	0	1.415.172.495	0	1.283.294.316	1	2.425.222.190	1	5.123.689.001	100,00	93,78
103102,0110	Pemeliharaan Berkala Jalan	Meningkatkan Kondisi Mantap Jalan	Kegiatan	1	10.743.489.000	1	243.000.000	Kegiatan	1	243.000.000	1	243.000.000	0	0	0	0		0	188.195.000	1	44.385.570	1	232.580.570	100,00	95,71
103102,0111	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan Semakin Mantap	Kegiatan	1	1.808.409.600	1	1.408.512.100	Kegiatan	1	1.408.512.100	1	3.259.335.200	0	0	0	0	198.580.040	0	645.617.695	1	2.385.638.760	1	3.229.836.502	100,00	99,09
103102,0123	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Terlaksananya Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Kegiatan	1	4.573.000.000	1	445.000.000	Kegiatan	1	445.000.000	1	470.000.000	0	0	0	0		0	152.963.550	1	297.865.830	1	450.829.386	100,00	95,92
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																							100,00	95,63	
Predikat Kinerja Kegiatan																							ST	ST	
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				574.456.678		597.404.400			597.404.400		657.047.500			-		324.159.453		17.715.946		307.637.440		649.512.839	100,00	98,85
103112,01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				125.000.000		286.039.700			286.039.700		286.039.700					258.084.570		900.000		25.580.900		284.565.470		
103112,0107	Pembiinan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Pekerja Konstruksi yang berkualitas	%	100	125.000.000	100	286.039.700	%	100	286.039.700	100	286.039.700	0	50	50	50	258.084.570	30	900.000	20	25.580.900	100	284.565.470	100,00	99,48
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																							100,00	99,48	
Predikat Kinerja Kegiatan																							ST	ST	
103112,02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				55.000.000		200.000.000			200.000.000		221.484.700									220.358.610		220.358.610		
103112,0202	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	%	100	55.000.000	100	200.000.000	%	100	200.000.000	100	221.484.700	0				70			30	220.358.610	100	220.358.610	100,00	99,49
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																							100,00	99,49	
Predikat Kinerja Kegiatan																							ST	ST	
103112,04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				394.456.678		111.364.700			111.364.700		149.523.100					66.074.883		16.815.946		61.697.930		144.588.759		
103112,0401	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Tersedia data dokumen Acuan / Standar Harga Barang dan Upah untuk Harga Satuan Bangunan Gedung Negara	Dokumen	1	119.456.678	1	91.185.700	Dokumen	1	91.185.700	1	119.344.100	0	0	0	0	51.113.883	0	13.815.946	1	49.497.930	1	114.427.759	100,00	95,88
103112,0403	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Meningkatnya tertib penyelenggaraan kegiatan konstruksi	%	100	275.000.000	100	20.179.000	%	100	20.179.000	100	30.179.000	0	50	50	50	14.961.000	30	3.000.000	20	12.200.000	100	30.161.000	100,00	99,94
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																							100,00	96,70	
Predikat Kinerja Kegiatan																							ST	ST	
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				650.000.000		202.020.800			202.020.800		335.547.600			-		53.117.135		69.076.732		208.109.355		330.303.222	100,00	98,44
10312203	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				350.000.000		120.179.000			120.179.000		128.655.000					21.000.845		35.740.430		69.997.421		126.738.696		
1031220301	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	Kegiatan	1	350.000.000	1	120.179.000	Kegiatan	1	120.179.000	1	128.655.000	0	0	0	0	21.000.845	0	35.740.430	1	69.997.421	1	126.738.696	100,00	98,51
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																							100,00	98,51	
Predikat Kinerja Kegiatan																							ST	ST	
10312204	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				300.000.000		81.841.800			81.841.800		206.892.600					32.116.290		33.336.302		138.111.934		203.564.526		
1031220402	Koordinasi dan Sinkronisasi Penelitian dan Pengawasan Hukum Bidang Penataan Ruang	Menurunnya Persentase Bangunan tak Ber IMB dan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Kegiatan	1	300.000.000	1	81.841.800	Kegiatan	1	81.841.800	1	206.892.600	0	0	0	0	32.116.290	0	33.336.302	1	138.111.934	1	203.564.526	100,00	98,39
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																							100,00	98,39	
Predikat Kinerja Kegiatan																							ST	ST	
JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												85.997.175.315	JUMLAH REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										77.845.935.594		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																							100,00	90,52	
PREDIKAT KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																							ST	ST	



2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis dan Penyusunan dan Penetapan SPM, pemerintah wajib menyusun SPM berdasarkan urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar, sebagai bagian dari pelayanan publik. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 selanjutnya mengatur tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah.

Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2024.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2022

Pada Tahun 2022 total anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang sebesar Rp. 85.997.175.315,- didapatkan realisasi anggaran sebesar Rp. 78.632.733.588,- atau terealisasi 91,44% yang artinya ada efisiensi dan efektivitas atau sebab lainnya sebesar 8,56% dan secara rata-rata telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.



Dinas Pekerjaan Umum Dan Penatan Ruang Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016) merupakan unsur pendukung dalam melaksanakan tugas tertentu. Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai SKPD, memiliki Visi / Misi dengan perumusan tujuan dan sasaran. program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan SKPD pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan SKPD lebihditekankan padatarget kinerja, baikpada dampak, hasil, maupunkeluaran dari suatu kegiatan, program dan sasaran.

Keberhasilan kinerja pelayanan SKPD dapat diukur dari sejauh mana realisasi program dan kegiatan SKPD dapat dicapai.



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi program antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau serta Kementerian dan lembaga ditingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

1. Masih adanya titik genangan air yang belum tertangani;
2. Masih adanya saluran drainase dalam kondisi kurang baik;
3. Masih adanya jalan dan jembatan dalam kondisi rusak;
4. Masih kurangnya sumber air baku;
5. Belum optimalnya akses terhadap sanitasi;
6. Belum optimalnya penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
7. Belum adanya revisi Perda dan Perkada tentang bangunan gedung.

b. Berdasarkan permasalahan diatas, solusi yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong diharapkan dapat mengantisipasi adanya tantangan/hambatan berupa jumlah titik genangan yang ditangani.
2. Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong diharapkan dapat mengantisipasi kemungkinan adanya peluang yang muncul berupa Saluran yang tidak berfungsi dengan baik
3. Program pembangunan jalan dan jembatan diharapkan dapat mengantisipasi adanya tantangan/hambatan berupa Jumlah jalan dan jembatan yang dalam kondisi rusak
4. Memperkuat intake Sei Gesek dan Interkoneksi waduk Galang Batang
5. Pemanfaatan kolong pasca tambang.
6. Pemanfaatan air laut untuk air minum (RO) di Kel Tanjungpinang Barat dan Pulau Penyengat.
7. Jangka panjang : Pembangunan Estuari DAM Muara Sungai Dompak rumah tangga yang belum mampu mengakses air minum layak.
8. Meningkatkan keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran.
9. Mengoptimal kan pemanfaatan segala sarana dan prasarana serta peralatan yang dimiliki.
10. Program pengembangan kinerja pengelolaan air Limbah harapkan dapat mengantisipasi adanya tantangan/hambatan berupa tersediannya sistem sanitasi/air limbah setempat yang memadai.
11. Adanya komitmen dari unsur pimpinan dan staf yang bervisi ke depan, yang merupakan syarat mutlak untuk merealisasikan motto Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
12. Perlu komitmen yang kuat antara pemerintah dan masyarakat bahwa pembangunan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik merupakan kegiatan yang berkesinambungan dan berkelanjutan
13. Perlu adanya rasa tanggungjawab semua pihak dalam penggunaan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan serta kepedulian masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur.



Sesuai dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11), Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang pekerjaan umum, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, sarana dan prasarana lingkungan, termasuk drainase di Kota Tanjungpinang. Isu-isu strategis di atas, jika tidak diantisipasi saat ini akan berdampak terhadap pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota.

Untuk mengantisipasi tantangan dan peluang di masa depan dalam rangka mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota, maka Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang telah menyiapkan 8 program utama, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
5. Program Penataan Bangunan Gedung
6. Program Penyelenggaraan Jalan
7. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.



Sedangkan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang yaitu:

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi;
2. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c. Bidang Bina Marga, membawahkan:
 1. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda;
 2. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda; dan
 3. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
- d. Bidang Cipta Karya, membawahkan:
 1. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda;
 2. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda; dan
 3. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda.
- e. Bidang Tata Ruang, membawahkan:
 1. Penata Ruang Ahli Muda;



- 2. Penata Ruang Ahli Muda; dan
 - 3. Penata Ruang Ahli Muda.
- f. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:
 - 1. Teknik Pengairan Ahli Muda;
 - 2. Teknik Pengairan Ahli Muda; dan
 - 3. Teknik Pengairan Ahli Muda.
- g. Bidang Jasa Konstruksi, membawahkan:
 - 1. Pembinaan Jasa Konstruksi Ahli Muda;
 - 2. Pembinaan Jasa Konstruksi Ahli Muda; dan
 - 3. Pembinaan Jasa Konstruksi Ahli Muda.
- h. UPT Dinas; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.



1.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.3
REVIEW RKPD 2024

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan / Sub Kegiatan Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2020 dan Kepmen 050	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024				Hasil Analisa Kebutuhan			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur				Rp 16,744,843,924.00				Rp 16,744,843,924.00	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Hasil Pengendalian Kegiatan Perangkat Daerah				Rp 305,000,000.00				Rp 305,000,000.00	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	Tanjung pinang	1	Rp 150,000,000.00	APBD	Tanjung pinang	1	Rp 150,000,000.00	APBD
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Tanjung pinang	1	Rp 155,000,000.00	APBD	Tanjung pinang	1	Rp 155,000,000.00	APBD

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pelayanan jasa administrasi keuangan				Rp 8.893.003.413,00				Rp 8.893.003.413,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Org/Bulan	Tanjung pinang	600	Rp 8.893.003.413,00	APBD	Tanjung pinang	600	Rp 8.893.003.413,00	APBD
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Operasional Pelayanan Administrasi Perkantoran				Rp 210.000.000,00				Rp 210.000.000,00	
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Pkt	Tanjung pinang	1	Rp 150.000.000,00	APBD	Tanjung pinang	1	Rp 150.000.000,00	APBD
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	Tanjung pinang	10	Rp 60.000.000,00	APBD	Tanjung pinang	10	Rp 60.000.000,00	APBD
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Operasional Pelayanan Administrasi Perkantoran				Rp 1.675.000.000,00				Rp 1.675.000.000,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Pkt	Tanjung pinang	1	Rp 50.000.000,00	APBD	Tanjung pinang	1	Rp 50.000.000,00	APBD
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Pkt	Tanjung pinang	2	Rp 500.000.000,00	APBD	Tanjung pinang	1	Rp 500.000.000,00	APBD

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Pkt	Tanjung pinang	1	Rp 55.000.000,00	APBD	Tanjung pinang	1	Rp 55.000.000,00	APBD
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Pkt	Tanjung pinang	2	Rp 250.000.000,00	APBD	Tanjung pinang	1	Rp 250.000.000,00	APBD
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Pkt	Tanjung pinang	2	Rp 200.000.000,00	APBD	Tanjung pinang	1	Rp 200.000.000,00	APBD
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	Tanjung pinang	1	Rp 20.000.000,00	APBD	Tanjung pinang	1	Rp 20.000.000,00	APBD
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Pkt	Tanjung pinang	1	Rp 50.000.000,00	APBD	Tanjung pinang	60	Rp 50.000.000,00	APBD
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	Tanjung pinang	50	Rp 350.000.000,00	APBD	Tanjung pinang	60	Rp 350.000.000,00	APBD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur				Rp 950.000.000,00				Rp 950.000.000,00	
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Tanjung pinang	1	Rp 350.000.000,00	APBD	Tanjung pinang	1	Rp 350.000.000,00	APBD
Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	Tanjung pinang	1	Rp 200.000.000,00	APBD	Tanjung pinang	1	Rp 200.000.000,00	APBD

Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	Tanjung pinang	1	Rp 400.000.000,00	APBD	Tanjung pinang	1	Rp 400.000.000,00	APBD
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Operasional Pelayanan Administrasi Perkantoran				Rp 3.071.000.000,00				Rp 3.071.000.000,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	Tanjung pinang	1	Rp 5.000.000.00	APBD	Tanjung pinang	1	Rp 5.000.000.00	APBD
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	Tanjung pinang	12	Rp 350.000.000,00	APBD	Tanjung pinang	1	Rp 350.000.000,00	APBD
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	Tanjung pinang	12	Rp 2.716.000.000,00	APBD	Tanjung pinang	12	Rp 2.716.000.000,00	APBD
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Operasional Pelayanan Administrasi Perkantoran				Rp 1.860.000.000,00				Rp 1.660.000.000,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	Tanjung pinang	2	Rp 250.000.000,00	APBD	Tanjung pinang	2	Rp 250.000.000,00	APBD
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Tanjung pinang	9	Rp 450.000.000,00	APBD	Tanjung pinang	9	Rp 450.000.000,00	APBD

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit	Tanjung pinang	3	Rp 250.000.000,00	APBD	Tanjung pinang	3	Rp 250.000.000,00	APBD
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	Tanjung pinang	80	Rp 150.000.000,00	APBD	Tanjung pinang	80	Rp 160.000.000,00	APBD
Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	Tanjung pinang	1	Rp 50.000.000,00	APBD	Tanjung pinang	1	Rp 50.000.000,00	APBD
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	Tanjung pinang	1	Rp 700.000.000,00	APBD	Tanjung pinang	1	Rp 500.000.000,00	APBD
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Jumlah Volume Tampungan Air Baku				-				Rp 8.500.000.000,00	
Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Volume Tampungan Air Baku				-				Rp 8.500.000.000,00	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelola SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Lembaga	Tanjung pinang	-	-	APBD dan DAK	Tanjung pinang	20	Rp 200.000.000,00	APBD
Sub Kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	Km	Tanjung pinang	-	-	APBD dan DAK	Tanjung pinang	0,12	Rp 2.950.000.000,00	APBD

Sub Kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	Tanjung pinang	-	-	APBD dan DAK	Tanjung pinang	1	Rp 400.000.000,00	APBD
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	Tanjung pinang	-	-	APBD dan DAK	Tanjung pinang	1	Rp 250.000.000,00	APBD
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Dokumen	Tanjung pinang	-	-	APBD dan DAK	Tanjung pinang	2	Rp 4.700.000.000,00	APBD
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PERSENTASE JARINGAN AIR MINUM YANG TERPASANG				Rp 1.600.000.000,00				Rp 1.600.000.000,00	
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air Bersih/Air Minum				Rp 1.600.000.000,00				Rp 1.600.000.000,00	
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	Tanjung pinang	1	Rp 100.000.000,00	APBD dan DAK	Tanjung pinang	1	Rp 100.000.000,00	APBD

Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Unit	Tanjung pinang	100	Rp 1.300.000.000,00	APBD	Tanjung pinang	100	Rp 1.300.000.000,00	APBD
Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit	Tanjung pinang	1	Rp 200.000.000,00	APBD	Tanjung pinang	1	Rp 200.000.000,00	APBD
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	JUMLAH SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT SPALD-T TERBANGUN				Rp 1.000.000.000,00				Rp 3.000.000.000,00	
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana dan Sarana Air Limbah				Rp 1.000.000.000,00				Rp 3.000.000.000,00	
Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	M3/Hari	Tanjung pinang	100	Rp 1.000.000.000,00	APBD	Tanjung pinang	100	Rp 3.000.000.000,00	APBD
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PERSENTASE DRAINASE DALAM KONDISI BAIK/PEMBUANGAN ALIRAN AIR TIDAK TERSUMBAT				Rp 1.000.000.000,00				Rp 7.000.000.000,00	

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sistem Jaringan Drainase Skala Kawasan				Rp 1.000.000.000,00				Rp 7.000.000.000,00	
Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan	Tanjung pinang	1	Rp 430.000.000,00	APBD	Tanjung pinang	1	Rp 4.200.000.000,00	APBD
Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Sistem Drainase Perkotaan	Tanjung pinang	1	Rp 430.000.000,00	APBD	Tanjung pinang	1	Rp 2.200.000.000,00	APBD
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Dokumen	Tanjung pinang	3	Rp 90.000.000,00	APBD	Tanjung pinang	3	Rp 600.000.000,00	APBD
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penambahan Bangunan Gedung Daerah				Rp 1.000.000.000,00				Rp 11.900.000.000,00	
Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Penambahan Bangunan Gedung Daerah				Rp 1.000.000.000,00				Rp 11.900.000.000,00	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF),	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF),	Dokumen	Tanjung pinang	50	Rp 100.000.000,00	APBD	Tanjung pinang	200	Rp 400.000.000,00	APBD

Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG									
Sub Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Unit	Tanjung pinang	1	Rp 300.000.000,00	APBD	Tanjung pinang	3	Rp 7.500.000.000,00	APBD
Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	Dokumen	Tanjung pinang	1	Rp 600.000.000,00	APBD	Tanjung pinang	2	Rp 4.000.000.000,00	APBD
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kota				Rp 2.400.000.000,00				Rp 19.103.659.441,21	
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kota				Rp 2.400.000.000,00				Rp 19.103.659.441,21	

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	Tanjung pinang	1	Rp 50.000.000,00	APBD	Tanjung pinang	3	Rp 150.000.000,00	APBD
Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	km	Tanjung pinang	1	Rp 100.000.000,00	APBD/DAK	Tanjung pinang	2	Rp 300.000.000,00	APBD/DAK
Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	km	Tanjung pinang	0,385	Rp 2.070.000.000,00	APBD & DAK	Tanjung pinang	2,32	Rp 13.312.062.472,00	APBD/DAK
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	km	Tanjung pinang	0,87	Rp 100.000.000,00	DAK	Tanjung pinang	0,52	Rp 2.627.211.873,23	APBD
Sub Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	km	Tanjung pinang	0,02	Rp 80.000.000,00	APBD	Tanjung pinang	1,00	Rp 740.996.161,76	APBD
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi				Rp 311.166.311,00				Rp 500.000.000,00	
Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi				Rp 200.000.000,00				Rp 350.000.000,00	
Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	Tanjung pinang	20	Rp 100.000.000,00	APBD	Tanjung pinang	50	Rp 150.000.000,00	APBD

Sub Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	orang	Tanjung pinang	35	Rp 100.000.000,00	APBD	Tanjung pinang	70	Rp 200.000.000,00	APBD
Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pekerjaan konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi				Rp 111.166.311,00				Rp 150.000.000,00	
Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Badan Usaha	Tanjung pinang	30	Rp 111.166.311,00	APBD	Tanjung pinang	50	Rp 150.000.000,00	APBD
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang				Rp 1.000.000.000,00				Rp 2.850.000.000,00	
Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase jumlah Dokumen RTRW dan RDTR yang Ditetapkan				Rp 700.000.000,00				Rp 1.900.000.000,00	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	Tanjung pinang	1	Rp 500.000.000,00	APBD	Tanjung pinang	1	Rp 1.500.000.000,00	APBD

Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Orang	Tanjung pinang	1	Rp 200.000.000,00	APBD	Tanjung pinang	1	Rp 400.000.000,00	APBD
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rasio pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dalam waktu 1 (satu) tahun				Rp 100.000.000,00				Rp 300.000.000,00	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dokumen	Tanjung pinang	1	Rp 100.000.000,00	APBD	Tanjung pinang	1	Rp 300.000.000,00	APBD
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rasio pelaksanaan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang				Rp 200.000.000,00				Rp 650.000.000,00	
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	Tanjung pinang	1	Rp 100.000.000,00	APBD	Tanjung pinang	1	Rp 250.000.000,00	APBD
Sub Kegiatan Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Dokumen	Tanjung pinang	1	Rp 100.000.000,00	APBD	Tanjung pinang	1	Rp 400.000.000,00	APBD

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

1.1.1 Terhadap RPJMN.

Dalam RPJMN 2015-2019, disebutkan bahwa Perluasan penjangkauan dalam penyediaan layanan publik terutama diarahkan pada paket pelayanan dasar minimal yaitu administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan infrastruktur dasar (perumahan yang layak, akses terhadap listrik, air minum, sanitasi, transportasi dan telekomunikasi).

Dalam Matrik Pembagunan RPJMN 2015-2019, bidang Prasarana dan Sarana, Kementerian PU dan PR bertanggung jawab terhadap beberapa PROGRAM LINTAS/ PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Waduk, Embung, Situ, serta Bangunan Penampung Air Lainnya;
2. Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak;
3. Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai;
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman/ Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan, Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan;
5. Program Penyelenggaraan Jalan/ Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

1.1.2 Terhadap RENSTRA KEMENTERIAN PUPR.

Substansi Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024 merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.



Arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2020-2024 secara umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel.

Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan Nasional adalah mengacu kepada RPJMN 2020-2024 dan berbasiskan pada keterpaduan infrastruktur wilayah, sesuai dengan rumusan tujuan yaitu :

1. Meningkatkan pemerataan antarwilayah KBI dan KTI maupun Jawa dan luar Jawa, melalui strategi pembangunan;
2. Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah dengan (i) optimalisasi kawasan strategis prioritas seperti KEK, KI, DPP, dan kawasan lainnya; (ii) optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) dan kota besar di luar Jawa dan meningkatkan daya dukung lingkungan untuk WM dan kota besar di Jawa; (iii) pembangunan kota baru dan pembangunan Ibu Kota Negara di luar pulau Jawa;
3. Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah;
4. Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah;

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran DPUPR dapat dilihat pada tabel 3.1

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN		
			2024	2025	2026
Peningkatan pelayanan infrastruktur air bersih, infrastruktur berketahanan bencana dan infrastruktur penunjang ekonomi	Meningkatnya pelayanan infrastruktur air bersih	Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Pelayanan Air Bersih (%)	30,92	31,26	31,60
	Meningkatnya pelayanan infrastruktur sanitasi air limbah domestik	Persentase Rumah Tangga Mengakses Pelayanan Limbah Domestik (%)	95,57	95,64	95,71
	Meningkatnya pengendalian banjir	Persentase Kawasan Bebas	99,24	99,28	99,31



		Genangan/Banjir			
	Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah melalui peningkatan jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kota (%)	65,55	66,10	66,65
Mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatnya perwujudan struktur ruang dan pola ruang terhadap rencana tata ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	43,67	44,00	44,33

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas rencana kerja dinas pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2024 diantaranya :

1. Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan ke Akses Kawasan Pariwisata, Agribisnis, Pengembangan Wilayah, Akses Perkotaan, Akses Sarana Pendidikan, dan Akses Sarana Kesehatan.

Pembangunan dibidang jalan untuk mencapai target kinerja kondisi mantap jalan kota tahun 2024 sebesar 65,55% dilaksanakan melalui kegiatan prioritas diantaranya:

- I. Sub Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
- II. Sub Kegiatan Pembangunan Jalan
- III. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan
- IV. Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan
- V. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan

2. Meningkatkan ketersediaan air melalui pembangunan embung, pembangunan jaringan air bersih (SPAM) dan sumur bor.

Pembangunan infrastruktur sumber daya air juga menjadi penting untuk mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan air melalui kegiatan - kegiatan seperti pembangunan embung/situ, pembangunan jaringan air bersih dengan rencana kegiatan antara lain :

- I. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku
- II. Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
- III. Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
- IV. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
- V. Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
- VI. Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
- VII. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan.



3. Pembangunan sarana gedung pemerintahan yang representatif Dalam meningkatkan kenyamanan aparatur sipil Negara di Kota Tanjungpinang dan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat maka pembangunan sarana gedung pemerintahan dianggap perlu, dengan rencana kegiatan diantaranya :
 - I. Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - II. Sub Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.1
Rancangan Akhir Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIAT AN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2024	PAGUINDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGUINDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						69.712.662.854,21							24.285.169.724,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UM UM DAN PENATAAN RUANG						69.712.662.854,21							24.285.169.724,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	P ersentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (P ersentase)				0,1	16.559.003.413,00							16.614.003.413,00	DINA S PEKERJAAN UM UM DAN PENATAAN
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan (Dokumen)				1,00	100.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)					1,00	305.000.000,00	DINA S PEKERJAAN UMUM DAN
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		1,00	1,00	1,00	50.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas PUPR	1,00	150.000.000,00 150.000.000,00	DINA S PEKERJAAN UMUM DAN
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		1,00	1,00	1,00	50.000.000,00	(KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas PUPR	1,00	155.000.000,00 155.000.000,00	DINA S PEKERJAAN UMUM DAN
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertibnya Pengelolaan Keuangan DPUPR (Persentase)				100	8.893.003.413,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)					100	8.893.003.413,00	DINA S PEKERJAAN UMUM DAN
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		600,00	600,00	600,00	8.893.003.413,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas PUPR	600,00	8.893.003.413,00 8.893.003.413,00	DINA S PEKERJAAN UMUM DAN
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Reformasi Birokrasi, Manajemen SDM dan Tata Organisasi yang prima (point)				80	210.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)					80	210.000.000,00	DINA S PEKERJAAN UMUM DAN
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		0,00	1,00	1,00	150.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas PUPR	1,00	150.000.000,00 150.000.000,00	DINA S PEKERJAAN UMUM DAN
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		6,00	10,00	10,00	60.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas PUPR	10,00	60.000.000,00 60.000.000,00	DINA S PEKERJAAN UMUM DAN



1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Kantor dan Administrasi Layanan Kepegawaian tepat waktu (Persentase)			100	1.675.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)				100	1.675.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		1.00	1.00	1.00	50.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PUPR	1.00	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3.00	2.00	2.00	500.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PUPR	2.00	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		1.00	1.00	1.00	55.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PUPR	1.00	55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		2.00	2.00	2.00	250.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PUPR	2.00	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		2.00	2.00	2.00	200.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PUPR	2.00	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		0.00	1.00	1.00	20.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PUPR	1.00	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)		0.00	0.00	1.00	50.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PUPR	1.00	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					550.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PUPR		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persentase)			100	950.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)				100	600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		0.00	0.00	1.00	350.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PUPR	2.00	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
1.03.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)		0.00	0.00	1.00	200.000.000,00	(TanjunGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PUPR	1.00	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
1.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		0.00	0.00	1.00	400.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PUPR	0.00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN



1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)			100	3.071.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)				100	3.071.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.00	1.00	1.00	5.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas PUPR	1.00	5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12.00	12.00	12.00	350.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas PUPR	12.00	350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	11.00	11.00	11.00	2.716.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas PUPR	11.00	2.716.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)			100	1.660.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)				100	1.660.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10.00	9.00	2.00	250.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas PUPR	2.00	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0.00	0.00	9.00	450.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas PUPR	9.00	450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	3.00	3.00	3.00	250.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas PUPR	3.00	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0.00	0.00	0.00	160.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas PUPR	0.00	160.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN



1.03.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	0.00	0.00	1.00	50.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PUPR	1.00	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				500.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
2.1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Jumlah Volume Tampungan Air Baku (M3)			1.673,850	8.500.000.000,00					0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Volume Tampungan Air Baku (M3)			1.673,850	8.500.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)				1.673,850	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.01.0078	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi (Lembaga)	0.00	0.00	20.00	200.000.000,00	(Tanjunpinang, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PUPR	0.00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun (KM)	0.00	0.00	0.12	2.950.000.000,00	(Tanjunpinang, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PUPR	0.00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	0.00	0.00	1.00	400.000.000,00	(Tanjunpinang, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PUPR	0.00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	0.00	0.00	1.00	250.000.000,00	(Tanjunpinang, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PUPR	0.00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.01.0124	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun (Unit)	1.00	1.00			(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	0.00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
1.03.02.2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun (Dokumen)	0.00	0.00	2.00	4.700.000.000,00	(Tanjunpinang, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PUPR	0.00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN



3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Pelayanan Air Bersih (Persentase)				30,92	300.000.000,00						200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Pelayanan Air Bersih (Persentase)				30,92	300.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)				31,26	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)							Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perumahan graha Indonesia permai RT.03/RW.0			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)		3	2	1	100.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas PUPR	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)							Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1.000.000.000,00			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)							Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		* CLUSTER SERUNI (JEMBATAN BUAYA), HANGTUAH PERMAI, Jl.Kijang Lama Gg.Marga Mulia 3 RW.003 koordinat 0.919053, 104.480603, Jln tugu pahlawan rt 02 rw 03 kelurahan bukit cermin, kampung dapur arang dompak, PERUMAHAN CITRA PELITA, PERUM GRAHA INDONUSA PERMAI RT.03/RW.01, RT 002/ RW 005, SEKRETARIAT			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)		0,00	0,00	1,00	200.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas PUPR	1,00	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN



4.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Mengakses Pelayanan Limbah Domestik (Persentase)				95,57	3.000.000.000,00						1.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Mengakses Pelayanan Limbah Domestik				95.57	3.000.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)				95.64	1.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (M ³ /Hari)		1158.00	1193.00	1263.00	3.000.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas PUPR	1278.00	1.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
	1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun							Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		KELURAHAN TANJUNGPINANG TIMUR			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
5.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Kawasan Bebas Genangan/Banjir (Persentase)				98,81	7.000.000.000,00						1.210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kawasan Bebas Genangan/Banjir (Persentase)				98.81	7.000.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)				98.85	1.210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)							Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERUMAHAN TAMAN HARAPAN INDAH RT.03 /			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Perkotaan)							Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kampung binatang 2/2 RT.001RW.002			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN



1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	1331.00	1300.00	800.00	2.200.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BELAKANG RUKO PESONA ASRI RT.02/RW.01. depan komplek angkutan laut. (Depan Masjid An-Nur)Kp. Dompok SeberangRT.001/RW.002. Dinas PUPR, Gang Mahakam Rw.09, Hutan Lindung RT.02/RW.01, Jalan Anggrek RT.007 RW.006, Jalan Ciku RT.06 RT.07 Rw.05, Jalan Dewa Ruci Rw.08, JALAN HUTAN LINDUNG RT.02/RW.01, Jalan Iarong bintang 1RT.001/ RW.002, Jalan Matador RT.004 RW.005, Jalan Matador RT.3 RW.6, Jalan Perintis RT.003,004 RW.001, Jalan Sei Jang Laut RT.003 RW.04, Jalan timbul Jaya RT.03 Rw.01, Jaln Perikan Rt.01 Rw.03, Jl. Basuki Rahmat Gg. Mayangsari V RT.003/011sampai dengan Jl. Engku Putri RT.001/012, JL. BASUKI RAHMAT AT. GG. TEMPINIS V DAN VII RT.03/RW.06, Jl. Basuki Rahmat Gg. Tirta RT.022010, Jl. Bintan RT.001/RW.11, Jl. Bukit Cernin Gang Depan Masjid Tissatul Auliyah RT.008 RW.001, Jl. Bukit Cernin RT.004/RW.007 . Kelurahan Kelurahan Kemboja, Jl. Darussalam Gg. Kenanga 3 RT.003 RW.004, Jl. Darussalam RT.007 RW.004, Jl. Dokter Sutomo Masjid Muclishin, JL. GUDANG MINYAK GG. PALAPA RW.12 KELURAHAN KEMBOJA, Jl. Hangtuah Kelurahan Tg. Pinang Kota, JL. HUTAN LINDUNG RT.4RW.5, Jl. IR. SUTAMI GG. TRALINGVINUS RT.2/RW.4, Jl. Kampoja Gang Melur RT.04/RW.03, Jl. Kampung Bugis RT.01/ RW.06, Jl. Kuantan Gg. Putri Ledang I RT.002 RW.001koordinat 0.915383, 104.479614, Jl. Lembah Purnama (Depan Masjid Al-Huda) RT.003007, JL. MERAPAS RT.1RW.5, Jl. M.T. HARYONO GG. EBONI RT.1RW.03, Jl. M.T. Haryono Gg. Tg. Sari, Jl. Pantai Impian Gang Penyu 3, RT.05/ RW.04, Jl. Pantai Impian Gang Udang No.45 RT.02/RW.06, Jl. POTONG LEMBURT 01RW 09 KELURAHAN KEMBOJA, Jl. Sulaiman Abdullah, Jl. Sultan Mahmud Gg. 45 RT.005RW.003, Jl. Sultan Sulaiman RT.01.02 RW.09,	160.00	580.000.000,00	580.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
-------------------	--	--	---------	---------	--------	------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	--	---	--------	----------------	----------------	--------------------------



1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	556.00	500.00	500.00	4.200.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				160.00	580.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
													580.000.000,00	
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	11.00	19.00	3.00	600.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3.00	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
													50.000.000,00	



6.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum			92	11.900.000.000,00						1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum (Persentase)			92	11.900.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)				93	1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung)	4.00	1.00	3.00	7.500.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.00	300.000.000,00 300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembo ngkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5.00	2.00	2.00	4.000.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.00	800.000.000,00 800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembo ngkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	200.00	200.00	200.00	400.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50.00	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



7.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertata (Persentase)						0,00					0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertata (Persentase)						(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)				0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata (Kawasan)			0,00	1,00		(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		* Dinas PUPR	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)			0,00	0,00		(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		* Dinas PUPR	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kota (Persentase)			65,55		19.103.659.441,21						2.350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kota (Persentase)			65,55		19.103.659.441,21	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)				66,10	2.350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)			17,00	10,00	3,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas PUPR	1,00	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya (KM)			3,00	17,00	1,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas PUPR	1,00	90.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (KM)			0,38	3,01	2,32	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas PUPR, Jalan Bawean gg.bawean 1 s.d 12 dan trijaya RT.03/RW.06, Jalan Dahla kampung bukit galang, Jalan Hang Jebat RT.01/RW.01 kelurahan Tg Ayun Saki, jalan hang kesturi rw.09, JALAN LINGKUNGAN PERUM GRIYA SENGARANG PERM AIDAN PERUM GRIYA SENGARANG LESTARI PERMAI RW.09, jalan menuju perumahan wonoyoso 2, Jalan mustahil RT.01/RW.5, Jl. Asyiah Sulaiman RT.005 RW.011, Jl. Anggrek Bulan 1 (menuju TPU Anggrek Merah) RT.04 RW.01, JL. BATAM RT.5 RW.6, Jl. H. Lingar Lr. Tabuan RT.001/002, Jl. Pramuka Lr. Bawean RT.001/005 Jl. Pramuka Lr. Beltung RT.003/005, Kp. Banjar gg. banjar dan J. Citra	0,35	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	0.00	0.00	0.08	387.845.000,00	(Tanjungpinang, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PUPR	0.00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	0.00	0.00	0.34	854.354.383,82	(Tanjungpinang, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PUPR	0.00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur (KM)						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jalan Nuri Indah			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	2.00	2.00	2.00	300.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PUPR	2.00	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	0.00	0.00	0.33	731.189.550,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PUPR, gang Rambutan Rt.3/4, Jl. H. Ungar Lr. Sulawesi RT. 001/003, Jl. KUNDUR RT 2 RW 8, Jl. Lembah Purnama Lr. Pl. Raja I (Ujung) RT. 003/006, Jl. Pemuda Gg. Asoka RT. 002/009,	0.00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	0.18	0.87	0.52	2.627.211.873,23	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PUPR, Perumahan griya senggaring permai dan griya senggaring lestari	0.02	110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
9. 1.03.11	P R O G R A M P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I	P ersentase P engembangan J a s a K o n s t r u k s i (P ersentase)			75,56	500.000.000,00					411.166.311,00	D I N A S P E K E R J A A N U M U M D A N
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang memiliki sertifikat (Persentase)			75.56	350.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)			87.41	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	0.00	0.00	50.00	150.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PUPR	20.00	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	390.00	440.00	70.00	200.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PUPR	50.00	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN



1.03.11.2.04	Pengawasan Terlib Usaha, Terlib Penyelenggaraan dan Terlib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pekerjaan konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi (Persentase)			100	150.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)				100	111.166.311,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN	
1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Terlib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Terlib Usaha (Badan Usaha)	30.00	30.00	50.00	150.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PUPR	30.00	111.166.311,00	111.166.311,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN	
10. 1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (Persentase)			43,91	2.850.000.000,00						900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase jumlah Dokumen RTRW dan RDTR yang Ditetapkan (Persentase)			100	1.900.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)				100	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN	
1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	0.00	0.00	1.00	1.500.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PUPR	0.00			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN	
1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi (Orang)	0.00	0.00	1.00	400.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PUPR	1.00	200.000.000,00	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rasio pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dalam waktu 1(satu) tahun (Persentase)			100	300.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)				100	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN	
1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	1.00	1.00	1.00	300.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PUPR	1.00	100.000.000,00	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rasio pelaksanaan penguasaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang (Persentase)			100	650.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)				100	600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN	
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1.00	1.00	1.00	250.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1.00	200.000.000,00	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
1.03.12.2.04.0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat (Dokumen)	1.00	1.00	1.00	400.000.000,00	(TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNG PINANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1.00	400.000.000,00	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
	J U M L A H					69.712.662.854,21						24.285.169.724,00		



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
UPTD SPAM KOTA TANJUNG PINANG
TAHUN 2024

NO	KOD E	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KE GIATAN/ SUB KEGIAT AN	INDIKA TOR PROGRA M /KEGIAT AN/S UB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISA SI CAPAIA N RENJA OPD	PRAKIRA AN CAPAIA N TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PER AN GKA T D A E R A H PEN A N GGU NG JAWAB
							TARG ET 2024	PA GU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUM BER DANA	PR IOR IT A S			TARG ET	PA GU INDIKATIF (Rp)	
											NASION AL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1,300,000,000. 00							2,250,000,0 00.00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN						1,300,000,000. 00							2,250,000,0 00.00	
1,	1.03.03	PROGR A M PENGELOLAAN DAN PENGEM B ANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah tangga yang dapat mengakses pelayanan air bersih (%)				30,92	1,300,000,000. 00							2,250,000,0 00.00	UPTD SPAM
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah tangga yang dapat mengakses pelayanan air bersih (%)				30.92	1.300.000.000,00	(Tanjungpinang, KOTA TANJUNG PINANG)					31.26	2.250.000.000,00	UPTD SPAM
	1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan (Unit)		0.00	100	100	1.300.000.000,00	(Tanjungpinang, KOTA TANJUNG PINANG)	Pendapatan dari BLUD, Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyaraka t	100	2.250.000.000,00 2.250.000.000,00	UPTD SPAM
	J U M L A H								1.300.000.000,00						2.250.000.000,00	



BAB V

PENUTUP

Disusunnya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang tahun 2024 yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang tahun 2024 s.d. 2026 ini dimaksudkan agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum yaitu bidang infrastruktur jalan, air bersih/minum, pengelolaan air limbah, pembangunan gedung kantor dan tata ruang pada tahun 2024.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang serta seluruh aparatnya diharapkan dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang tahun 2023 ini disusun, semoga dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi kita semua.

Tanjungpinang, 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

KOTA TANJUNGPINANG



Dr. SUSLI, M.Eng
NIP. 19730615 200312 1 008